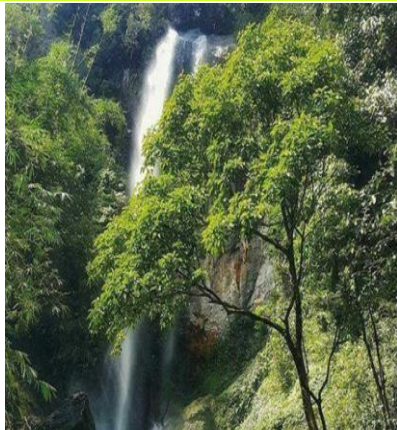


**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

TAHUN 2021

**KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PERJANJIAN KINERJA (PK) DAN
PERUBAHAN
TAHUN 2022**

KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ringkasan Eksekutif.....	li
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Bab I : PENDAHULUAN	
1.1. Gambaran Umum Organisasi.....	1
1.2. Struktur Organisasi.....	2
1.3. Sumberdaya Pegawai/Aparatur.....	4
1.4. Isu-isu Strategis dan permasalahan Umum yang di hadapi.....	5
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
Bab II : Perencanaan dan perjanjian Kinerja	8
2.1. Rencana Strategis(Renstra) Kecamatan Situjuah Limo nagari	8
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	16
Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja..	19
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	20
3.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	22
3.4. Analisis Efisiensi Anggaran.....	39
3.5. Realisasi Anggaran (Program dan Kegiatan).....	44
Bab IV : PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan.....	54
4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang.....	55
Lampiran	
Lampiran	

DAFTAR TABEL

1	Sumberdaya Manusia.....	4
2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
3	Tujuan dan strategis kebijakan	14
4	Perjanjian Kinerja tahun 2021.....	16
5	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan.....	20
6	Realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2021.....	21
7	Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	39
8	Realisasi Anggaran.....	44

DAFTAR GRAFIK

1	Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2019 dan 2020	18
2	Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dan 2021.....	21
3	Target dan Realisasi Status Nagari 2020 dan 2021.....	24
4	Target dan Realisasi Nagari yang menetapkan APB tepat Waktu 2020 dan 2021.....	28
5	Target dan Realisasi badan Usaha Nagari yang aktif Tahun 2020 dan 2021.....	33

DAFTAR GAMBAR

1	Fasilitas Pendukung Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Situjuah Limo Nagari	28
2	Evaluasi APB nagari oleh Tim Klinik Keuangan	30
3	Persiapan Penyusunan APB Nagari oleh Tim Klinik Keuangan Kecamatan Situjuah Limo Nagari	31
4	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Situjuah Batua Bidang Usaha Mini Market 2020 dan 2021	32
5	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Nagari Bersama Kecamatan Situjuah Limo Nagari	33

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan wujud Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Situjuah Limo Nagari yang berisi hasil informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah.

Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Pada Tahun 2021 mendapat alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.146.641.602,00 setelah Refocusing APBD Tahun 2021 menjadi Rp. 1.710.186.378,00 Anggaran ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja APBD Kecamatan Situjuah Limo Nagari ini dialokasikan untuk pelaksanaan 06 program dan 13 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota. Total realisasi belanja pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2021, khususnya yang terkait dengan program, kegiatan dan Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 1.702.606.087,00 Jumlah tersebut mencapai 99,56 %.

Maka nilai serapan anggaran untuk pencapaian target-target sasaran strategis mengalami peningkatan dari tahun yang lalu.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Pencapaian Kinerja, maka tingkat capaian kinerja untuk tahun 2021 pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena hampir semua indikator dapat diwujudkan 100%.

KATA PENGANTAR



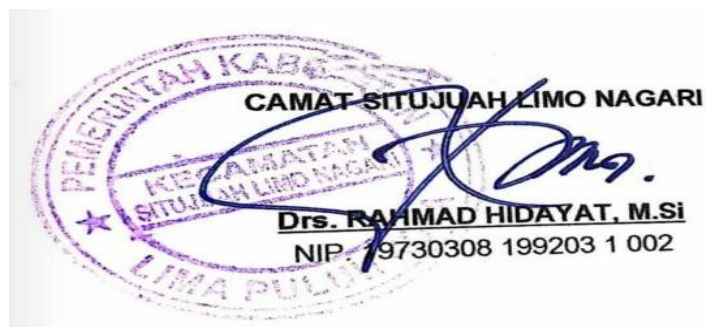
Puji dan Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja pada pemerintah dan masyarakat secara transparan. Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas tersebut perlu ditetapkan parameter sebagai ukuran dari capaian kinerja instansi pemerintah tersebut sehingga pada akhir pelaksanaan tahun anggaran nantinya bisa dilakukan evaluasi kinerja yang berimbas pada perbaikan kinerja pada tahun berikutnya kearah yang lebih baik

LKjIP ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Banda Dalam , Maret 2022



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2019 Kecamatan Situjuh Limo Nagari merupakan LKJIP ke 4 (Empat) yang disusun, LKJIP Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2019 melaporkan tentang pencapaian hasil kinerja selama 2019 dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2018, yang sepenuhnya mengacu kepada Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021.

Di tahun 2019 Kecamatan Situjuh Limo Nagari menetapkan 4 sasaran strategis dan 5 Indikator Kinerja sebagaimana diuraikan dalam rencana kerja tahun 2019, dan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2019.

Hasil pencapaian kinerja Tahun 2019 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kecamatan Situjuh Limo Nagari telah berhasil dan melaksanakan seluruh sasaran staregis yang ditargetkan dalam rencana strategis Rencana kinerja, meskipun belum sepenuhnya berhasil dikarenakan masih beberapa kendala. Namun demikian keberhasilan yang telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi Kecamatan Situjuh Limo Nagari untuk meningkatkan kinerja yang akan datang sebagai cerminan untuk menentukan langkah - langkah kebijakan Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang akan datang.

Keberhasilan yang akan diperoleh selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 diukur dari terciptanya 100 % sasaran strategis yang ditetapkan.

Keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi dapat kami
Kecamatan Situjuh Limo Nagari I LKJIP Tahun 2021 ii

jadikan sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kinerja Satuan Kerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparaturnya bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2021. Juga dengan memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra OPD 2016-2021 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 dengan Sasaran RPJMD 2016-2021 dan Indikator Kinerja 2016-2021.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pelayanan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial

Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Wewenang adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

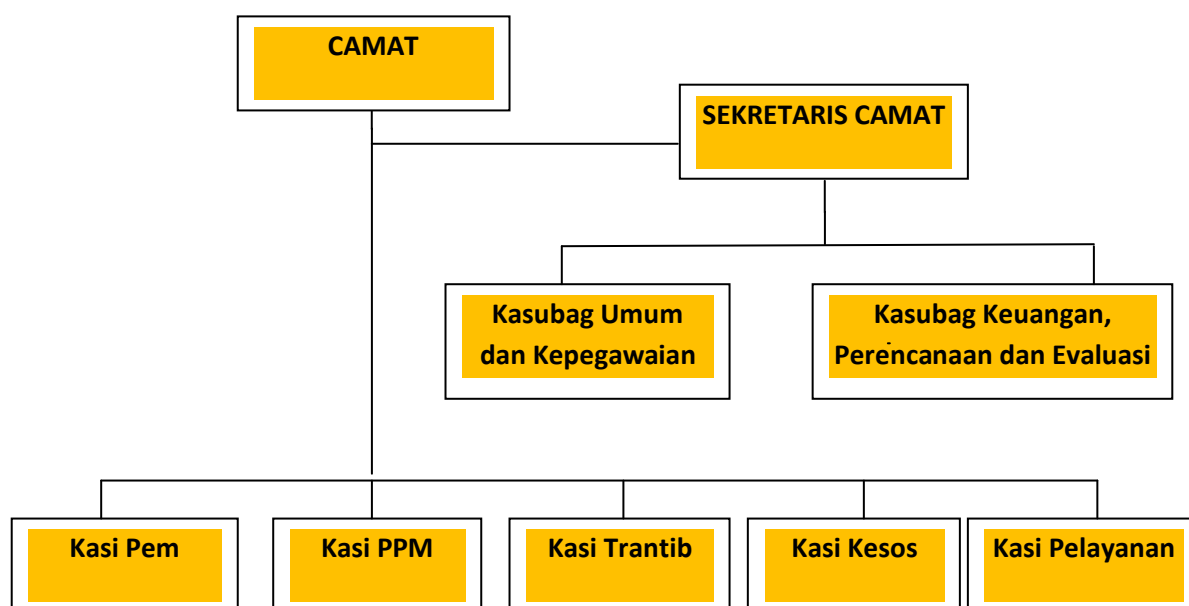
Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Situjuah Limo Nagari dapat dilihat pada tabel Struktur seperti dibawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Situjuah Limo Nagari

1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan.

**Tabel 1.1 Sumberdaya Manusia berdasarkan Eselon/
Struktural/fungsional/ Tenaga Harian Lepas (THL)**

No	Eselon	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1	Eselon III/a	1	
2	Eselon III/b	1	
3	Eselon IV/a	5	
4	Eselon IV/b	2	
5	Pelaksana	6	
6	PTT	0	
7	Tenaga Harian Lepas (THL)	3	
JUMLAH		18	

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel: 1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	Sarjana Strata Dua (S2)	2	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	8	
3	D IV	0	
4	D III	1	
5	SLTA	6	
6	SLTP	1	
	Jumlah	18	

(Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Situjuh Limo Nagari)

1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI.

Kecamatan Situjuh Limo Nagari berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD kedua 2010-2015 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat. Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2016 - 2021 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

1. Belum optimalnya pengelolaan Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat.
2. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
3. Belum maksimalnya upaya peningkatan dan pengembangan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nagari.
5. Belum maksimalnya Nagari dalam menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun LKJiP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.2. STRUKTUR ORGANISASI
- 1.3. SUMBERDAYA PEGAWAI/APARATUR
- 1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI
- 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN
- 2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA
- 3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA
- 3.4. ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN
- 3.5. TINDAK LANJUT LHE ISPEKTORAT
- 3.6 DAFTAR PRESTASI

BAB IV : PENUTUP

- 4.1. KESIMPULAN
- 4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2016-2021.

2.1.1. VISI

Visi adalah tujuan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Dengan kata lain, "visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu". Visi dan misi OPD ini harus sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Visi :” Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

2.1.2. MISI

Misi menjawab pertanyaan ini: Mengapa organisasi ini ada? Misi adalah garis besar dari apa yang hendak dicapai oleh organisasi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai / mempercepat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan strategi yang diterapkan di lingkungan kerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai unit kerja induk bagi Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Dari Visi dan Misi Kabupaten tersebut dapat dijabarkan pula misi Kabupaten sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf/kualitas hidup Masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah, peningkatan manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM), Gerakan Usaha Dini Mandiri, serta Gerakan

Pemberdayaan Perempuan, Gerakan Sayang Jompo, Bank Tanah Nagari, Usaha Ekonomi Produktif Pemuda.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau, Mesjid, MDA,TPA/TPSA dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia dan pemberian tunjangan pendidikan perguruan tinggi terhadap keluarga kurang mampu, berprestasi, atlet dan mereka yang mengharumkan nama daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik dan penciptaan iklim investasi yang didukung dengan optimalisasi pelayanan infrastruktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi seutuhnya dan jaminan Penjenjangan Karir dan Kesejahteraan PNS, Perangkat Nagari dan Pekerja Sosial Masyarakat.
6. Peningkatan pembangunan berbasis Jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lumbung piti nagari, sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.
7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat beragama.
8. Mewujudkan keberadaan kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi dengan mempersiapkan infrastruktur dan pererangkat lunak.
9. Menghadirkan pengakuan, penghargaan dan kompensasi terhadap Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai daerah basis PDRI 1948-1949 dan memiliki anak Nagari mempunyai andil dan jasa di Republik ini. Mengembalikan kedaulatan rakyat, baik kedaulatan bernegara, beragama maupun kedaulatan adat.

2.1.3. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Situjuh Limo Nagari yang selaras dengan RPJMD Tahun 2016-2021 Kabupaten Lima Puluh Kota, beserta strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel. 2.1 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021)

VISI No. IV: Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa.			
MISI I: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis - Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Meningkatkan kapasitas aparatur yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikut sertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik - Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan
		2. Meningkatkan sarana prasarana penunjang pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik - Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.

MISI II : Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi)	Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi
		Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di nagari	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari - Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Bumrag.	Menfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumrag bagi Masyarakat

Tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

- a. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan yang tertib dan dinamis, serta koordinasi dengan unit kerja lain yang lancar dan mantap dengan melibatkan masyarakat sehingga memperoleh data yang aktual dan faktual
- b. Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dan partisipasi aktif aparatur pemerintah, masyarakat dan swasta pada berbagai aspek yang ada di kecamatan yang mendukung program Pemerintah sehingga tercipta Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya asset kecamatan yang berorientasi kepada kepentingan publik sehingga terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Tujuan

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari
				Skor Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Memperkuat	Meningkatkan	Persentase nagari yang	Meningkatnya Kualitas Tata	Jumlah nagari yang

2	Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Kelola Pemerintahan Nagari	berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari
					Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
				Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2021. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran laporan ini.

**Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Situjuah Limo Nagari
Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	5 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2021 yang ditetapkan pada awal tahun 2021 berpedoman pada Renstra Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2021, dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2016-2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel : 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2021

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	75
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	5 Nagari
		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80%

	Program		Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	1.644.321.678
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	12.756.900
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp	14.475.000
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	11.225.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	8.867.500
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	18.540.300
	JUMLAH	Rp	1.710.186.378

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Situjuh Limo Nagari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

4.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2021.

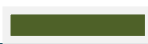

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala peringkat kinerja dikutip lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

Tabel. 3.1.

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis
dan Capaian Indikator Kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Kode
1	91% - 100%	Sangat Tinggi	
2	76% - 90%	Tinggi	
3	66% - 75%	Sedang	
4	51% - 65 %	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

4.1. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Situjuh Limo Nagari telah menetapkan Indikator Kinerja Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2016-2021. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian Kinerja Indikator Utama Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021			Kode
		Target	Realisasi	%Capaian	
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	75	66,09	89,2%	
2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	83,06	103,8%	
3 Jumlah nagari yang berstatus Mandiri dan maju di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	%	5 Nagari	5 Nagari	100 %	

4	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	%	100%	80 %	80 %	
5	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	%	80%	80%	100%	

Dari hasil pengukuran diatas, rata-rata capaian indikator kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2021 berada pada posisi Tinggi.

4.2. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berikut uraian dan capaian masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja beserta analisisnya :

MISI I :Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Starategis 1. : Meningkatnya kualitas kinerja kecamatan Situjuh Limo Nagari

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	75	73	64,06	75	66,09	

Berdasarkan hasil penilaian Sakip Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2020 kecamatan Situjuh Limo Nagari memperoleh nilai sebesar 66,9.

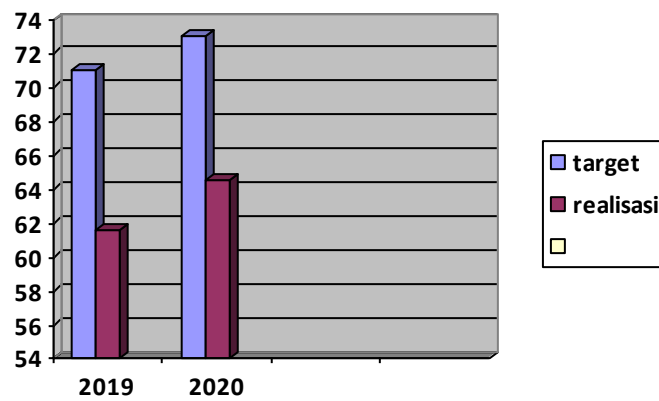
Berikut hasil evaluasi inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap sakip kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2020 yaitu:

- Kecamatan Situjuh Limo Nagari telah memiliki dokumen Renstra tahun 2016-2021, namun Renstra belum memuat indikator kinerja

tujuan dan renstra sudah di publikasikan, namun belum direviu secara berkala.

- Renstra telah memuat ukuran keberhasilan walau belum sempurna belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.
- Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon II, III dan IV sebagai kinerja atasannya.
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (Bulanan/triwulan/semester)
- Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi.
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari eselon IV keatas belum dikaitkan/ dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- Laporan Kinerja telah di *upload* ke dalam *website*, namun belum di *reviu* secara berkala.
- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilaksanakan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan belum berkesinambungan.
- Belum ada pemantauan Rencana aksi sehingga tidak bisa memberikan alternatif perbaikan setiap periode.
- Target pada umumnya telah dapat dicapai dengan baik dari tahun sebelumnya, serta informasi kinerja dapat diandalkan.

Grafik 1 : Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Tahun 2019 dan 2020



Gambar 1: Pengarahan dari Camat kepada Pegawai Kecamatan Situjuh Limo Nagari



Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	79	82,72	80	83,06	

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Realisasi dari Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di tahun 2021 adalah 83,06 sedangkan target yang di rencanakan adalah 80 dengan capaian realisasi sebesar 103,8%.

Dari Pelaksanaan Survey selama 12 Bulan lamanya dengan pengisian langsung dari masyarakat maka petugas berhasil mengumpulkan sebanyak 200 Kuesioner dengan data terisi dengan baik dan data lengkap sesuai dengan point-point yang dimintakan pada Kuesioner sehingga data tersebut dapat diolah dan dianalisis lebih Lanjut.

Dari 200 kuesioner yang mengisi data pribadinya lengkap adalah sebagai berikut :

a. Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Responden
Laki-laki	98
Perempuan	102
Tidak diketahui	-
Jumlah	200

Tabel 1. Jenis Kelamin

b. Data Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Responden
SD	9
SLTP	24
SLTA	98
DIII	22
S1	45
S2	2
Tidak diketahui	-
Jumlah	200

Tabel 2. Berdasarkan Pendidikan

c. Data responden Berdasarkan Jenis Layanan yang diterima

Layanan yang diterima	Responden
KK	48
KTP	30
Surat pindah	76
Poli Umum	20
Jumlah	200

Tabel 3. Berdasarkan Jenis Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang harus diukur melalui kualitas pelayanan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan Pelayanan
2. Prosedur Pelayanan

3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / Tarif Pelayanan
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan
9. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan Penilaian SKM dihitung dengan menggunakan “ Nilai Rata-rata Tertimbang “ masing-masing unsur pelayanan. Dalam menghitung Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

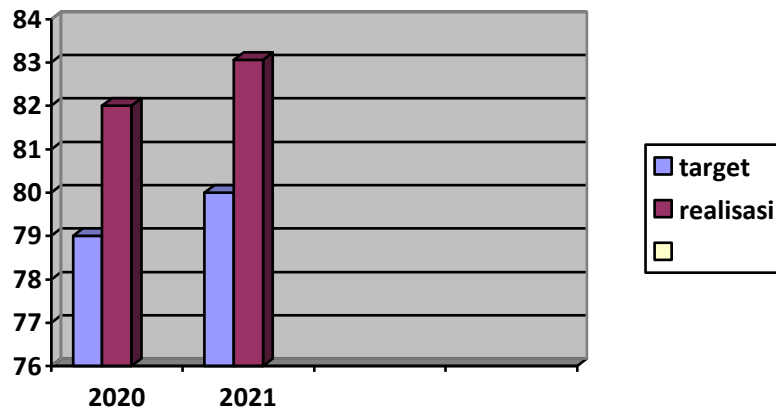
Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata (NRR) tertimbang dengan rumus :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Grafik 2 : Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2020 dan Tahun 2021



Gambar 2 :Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Situjuah Limo Nagari



MISI II : Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong

Sasaran Strategis 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Jumlah nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	5 Nagari	

	yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari						
2	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	100 %	80%	60%	100 %	80%	

a. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju.

Jumlah nagari yang berstatus Maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari di tahun 2021 adalah 4 Nagari dan 1 nagari sudah berstatus Mandiri, capaian realisasi tahun 2021 sebesar 100% dengan realisasi tahun 2021 sebanyak 100 % dari target awal sebanyak 5 nagari.

- a) Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Target Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2021 adalah 5 Nagari dan terealisasi 5 Nagari. Ini berarti dari 5 Nagari yang berada di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, semuanya sudah berstatus berkembang dan maju. Hasil ini didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari (DPMDN) Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah menetapkan status desa/ nagari melalui pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemutakhiran status perkembangan desa IDM yang dibuat dengan bekerja sama dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa/ Nagari

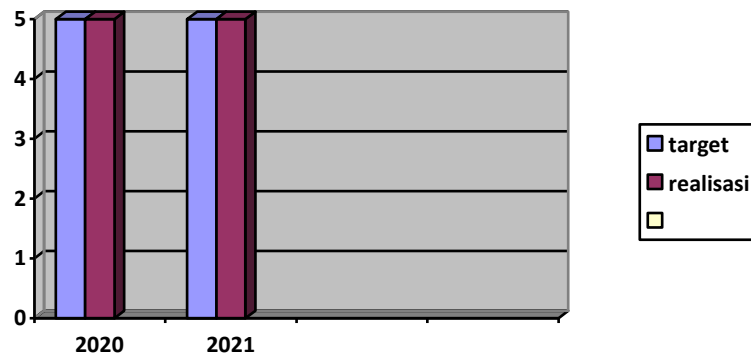
Berikut daftar nagari berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari tahun 2021 yaitu;

Tabel 3.2 Nagari Berstatus Maju dan Mandiri di kecamatan Situjuah Limo Nagari

NO	NAGARI	STATUS NAGARI
1	Situjuah Gadang	Maju
2	Situjuah Banda Dalam	Maju
3	Situjuah Ladang Laweh	Maju
4	Situjuah Batua	Mandiri
5	Tungkar	Maju

Data Indeks Indonesia Membangun (IDM) Tahun 2021

Grafik 3 : Target dan Realisasi Persentase Nagari yang berstatus Mandiri dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari



a. Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu

Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu dengan capaian realisasi untuk tahun 2021 sebesar 100 % dengan target awal tahun 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 80 % yaitu sebanyak 4 nagari. Nagari tersebut adalah Nagari Situjuah Batua, Situjuah Gadang, Tungkar dan Situjuah Ladang Laweh. Yang belum yakninya Nagari Situjuah Banda Dalam

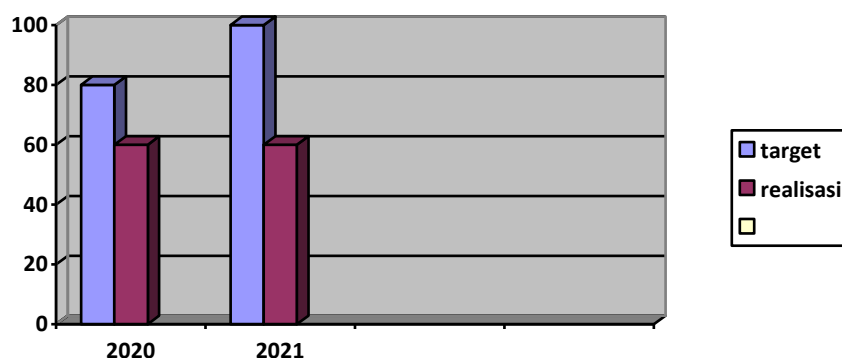
Gambar 3: Evaluasi APB Nagari oleh Tim Klinik Keuangan Kecamatan Situjuah Limo Nagari.



Gambar 4: Persiapan Evaluasi APB Nagari oleh Tim Klinik Keuangan Kecamatan Situjuah Limo Nagari.



Grafik 4: Target dan Realisasi Persentase APB Nagari yang tepat waktu di Kecamatan Situjuah Limo Nagari.



Sasaran Strategis 4.2 Meningkatnya keberdayaan masyarakat nagari

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Ket
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	92%	75%	60%	80%	80%	

a. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif

Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif. Realisasi dari Indikator Kinerja adalah Nagari yang Bumagnya aktif yaitu Nagari Banda Dalam, Situjuah Batua, Situjuah Ladang Laweh dan Tungkar.

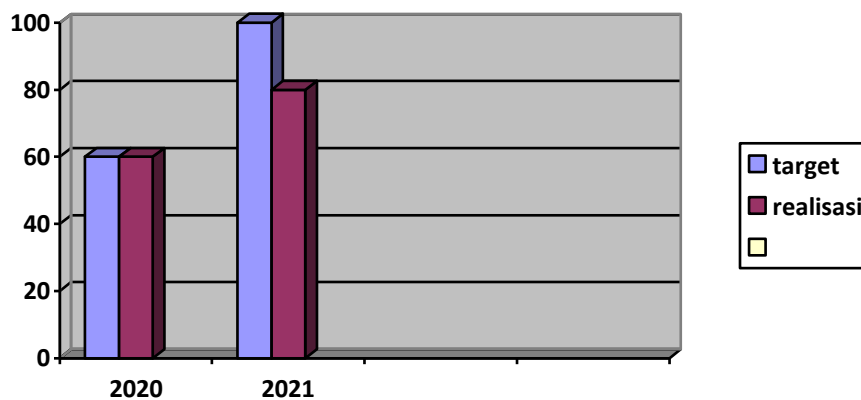
Gambar 4: BUMNag Situjuah Batua.



Gambar 4: Badan Kerjasama Antar Nagari (BKAN).



Grafik 5 : Target dan Realisasi Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif



3.3.1. Analisis Penyebab Keberhasilan

Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan yakni:

- ✓ Adanya dukungan dan kompetensi yang baik dari Aparatur Sipil Negara yang ada.
- ✓ Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Daerah ada, Pemerintah Nagari dan Unsur-unsur masyarakat.
- ✓ Sarana dan prasarana penunjang yang di upayakan untuk di optimalkan.
- ✓ Adanya Peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
- ✓ Dukungan anggaran yang mencukupi.

3.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan, tentunya

dengan sumber daya yang ada, menghindari yang pemborosan anggaran dan dengan Sumber Daya Manusia Kantor Camat yang jumlahnya tidak terlalu banyak.

3.3.3. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang

Adapun program menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN INDIKATOR	URUSAN/PROGRAM/
				KEGIATAN / SUB KEGIATAN
1	Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	66,09%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

				Pengadaan mebel Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,06%	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan

				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan Situjuh Limo Nagari	100%	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</p> <p>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</p> <p>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</p> <p>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</p> <p>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p>

		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	80 %	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	80 %	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Penyusunan Pembangunan Partisipatif Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

3.4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Kecamatan Situjuh Limo Nagari merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dengan melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan urusan pemerintahan dan 44 Sub Kegiatan. Dengan anggaran belanja operasional **Rp. 1.710.186.378.-** dan realisasi belanja **Rp. 1.702.606.087,-** atau **99,56 %**.

Berikut anggaran tahun 2021 setelah perubahan serta realisasi dan efisiensi anggaran dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.4 Anggaran sebelum dan setelah perubahan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI PERUBAHAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 1,989,602,578	Rp 1,644,321,678	Rp1,636,811,687
a	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp 9,770,000	Rp 6,441,000	Rp 6,441,000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 1,000,000	Rp 567,000	Rp 567,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1,000,000	Rp 529,000	Rp 529,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1,000,000	Rp 906,000	Rp 906,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 4,770,000	Rp 2,439,000	Rp 2,439,000
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1,590,468,978	Rp 1,432,302,878	Rp1,426,256,497
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,584,488,978	Rp 1,426,806,878	Rp 1,420,760,497
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1,514,000	Rp 750,000	Rp750,000
3	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 750,000	Rp 2,220,000	Rp 2,220,000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	Rp 3,000,000	Rp 2,040,000	Rp 2,040,000
5	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Rp 716,000	Rp 486,000	Rp 486,000
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 1,410,000	Rp 114,000	Rp -

1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 1,410,000	Rp 114,000	Rp	-
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 20,500,000	Rp 500,300	Rp	500,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Rp 20,000,000	Rp 300	Rp	-
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 500,000	Rp 500,000	Rp	500,000
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 158,831,600	Rp 67,439,300	Rp	67,411,300
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1,400,000	Rp 739,000	Rp	739,000
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 55,500,000	Rp -	Rp	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 17,176,800	Rp 12,460,700	Rp	12,460,700
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Rp 2,064,000	Rp -	Rp	5,961,600
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 9,015,800	Rp 8,909,600	Rp Rp	8,881,600 -
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 7,000,000	Rp 4,950,000	Rp Rp	4,950,000 -
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 66,675,000	Rp 40,380,000	Rp Rp	40,380,000 -
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 57,500,000	Rp -	Rp	-
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 20,000,000	Rp -	Rp	-
2	Pengadaan Mebel	Rp 37,500,000	Rp -	Rp	-
3	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Rp 20,000,000	Rp 20,000,000	Rp	-
4	Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Lainnya	Rp -	Rp -	Rp	-
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 74,872,000	Rp 70,539,200	Rp	69,240,240
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1,440,000	Rp 100,000	Rp	100,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Rp 8,400,000	Rp 6,470,500	Rp	5,171,540

3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 65,032,000	Rp 63,968,700	Rp 63,968,700
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	Rp 76,250,000	Rp 66,985,000	Rp 66,962,650
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 72,600,000	Rp 61,875,000	Rp 61,852,650
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 3,650,000	Rp 5,110,000	Rp 5,110,000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 27,262,700	Rp 12,756,900	Rp 12,756,900
a.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 9,130,000	Rp 4,845,000	Rp 4,845,000
1.	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Rp 9,130,000	Rp 4,845,000	Rp 4,845,000
b.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Rp 18,132,700	Rp 7,911,900	Rp 7,911,900
1.	Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 18,132,700	Rp 7,911,900	Rp 7,911,900
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 34,794,300	Rp 14,475,500	Rp 14,405,000
a.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 34,794,300	Rp 14,475,500	Rp 14,405,000
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 7,725,000	Rp 5,525,500	Rp 5,455,000
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 27,069,300	Rp 8,950,000	Rp 8,950,000

IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 21,412,500	Rp 11,225,000	Rp 11,225,000
a.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 14,412,500	Rp 7,925,000	Rp 11,225,000
1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara nasional Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Rp 11,412,500	Rp 6,825,000	Rp 6,825,000
2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 3,000,000	Rp 1,100,000	Rp 1,100,000
b.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Rp 7,000,000	Rp 3,300,000	Rp 3,300,000
1.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 7,000,000	Rp 3,300,000	Rp 3,300,000
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 14,550,000	Rp 8,867,000	Rp 8,867,500
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 14,550,000	Rp 8,867,000	Rp 8,867,500
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp -	Rp -	Rp -
3	Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal	Rp 10,000,000	Rp 4,080,000	Rp 4,080,000
4	Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Rp -	Rp -	Rp -
5	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 4,550,000	Rp 4,787,000	Rp 4,787,500
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 54,893,800	Rp 18,540,300	Rp 18,540,000
a	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 54,893,800	Rp 18,540,300	Rp 18,540,000
1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Rp 1,800,000	Rp 825,000	Rp 825,000

2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 6,185,000	Rp 3,825,000	Rp 3,825,000
3	Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Rp 13,747,500	Rp 3,180,000	Rp 3,180,000
4	Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat daerah	Rp -	Rp -	Rp -
5	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp 300	Rp 300	Rp -
6	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Rp -	Rp -	Rp -
7	Fasitasi penyusunan perencnaan pembangunan partisipatif	Rp 16,718,500	Rp 4,710,000	Rp 4,710,000
8	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp 7,000,000	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
9	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Rp 9,442,500	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
	JUMLAH	Rp 2,146,641,602	Rp 1,710,186,378	Rp 1,702,606,087

Tabel : 3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN	INDIKATOR	% CAPAIAN INDIKATO R	URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISA SI	% CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Akuntabilita s Kinerja Kecamatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 1,644,321,678	Rp1,636,811,687	99,54	99,54	Efisien
				Perencanaan, Penggangan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Rp 6,441,000	Rp 6,441,000	100	100	Efisien
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 567,000	Rp 567,000	100	100	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 529,000	Rp 529,000	100	100	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 906,000	Rp 906,000	100	100	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	100	100	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	100	100	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 2,439,000	Rp 2,439,000	100	100	Efisien
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1,432,302,878	Rp1,426,256,497	99,58	99,58	Efisien

				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1,426,806,878	Rp 1,420,760,497			Efisien
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 750,000	Rp750,000	99,58	99,58	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 2,220,000	Rp 2,220,000	100	100	Efisien
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 2,040,000	Rp 2,040,000	100	100	Efisien
				Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Rp 486,000	Rp 486,000	100	100	Efisien
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 114,000	Rp -	-	-	Efisien
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 114,000	Rp -	-	-	Efisien
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 500,300	Rp 500,000	99,94	99,94	Efisien
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Rp 300	Rp -			Efisien
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 500,000	Rp 500,000	100	100	Efisien
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 67,439,300	Rp 67,411,300	99,96	99,96	Efisien

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp 739,000	Rp 739,000	100	100	Efisien
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp -	Rp -	-	-	Efisien
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 12,460,700	Rp 12,460,700	100	100	Efisien
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Rp -	Rp 5,961,600	100	100	Efisien
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 8,909,600	Rp 8,881,600	99,69	99,69	Efisien
									Efisien
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 4,950,000	Rp 4,950,000	100	100	Efisien
									Efisien
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 40,380,000	Rp 40,380,000	100	100	Efisien
									Efisien
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp -	Rp -	-	-	Efisien
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp -	Rp -	-	-	Efisien
				Pengadaan Mebel	Rp -	Rp -	-	-	Efisien
									Efisien

				Pengadaan perlatan mesin dan lainnya	Rp 20,000,000	Rp -	-	-	Efisien
									Efisien
				Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Lainnya	Rp -	Rp -			Efisien
							-	-	Efisien
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 70,539,200	Rp 69,240,240	98,16	98,16	Efisien
									Efisien
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 100,000	Rp 100,000	100	100	Efisien
									Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Rp 6,470,500	Rp 5,171,540	79,92	79,92	Efisien				
					Efisien				
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 63,968,700	Rp 63,968,700	100	100	Efisien				
II	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 66,985,000	Rp 66,962,650	99,97	99,97	Efisien
									Efisien
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Rp 61,875,000	Rp 61,852,650	99,96	99,96	Efisien

			Jabatan					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 5,110,000	Rp 5,110,000	100	100	Efisien
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -			Efisien
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp -	Rp -			Efisien
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 12,756,900	Rp 12,756,900	100	100	Efisien
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 4,845,000	Rp 4,845,000	100	100	Efisien
			Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	Rp 4,845,000	Rp 4,845,000	100	100	Efisien
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Rp 7,911,900	Rp 7,911,900	100	100	Efisien

				Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 7,911,900	Rp 7,911,900	100	100	Efisien
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 11,225,000	Rp 11,225,000	100	100	Efisien
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 7,925,000	Rp 11,225,000	100	100	Efisien
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara nasional Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Rp 6,825,000	Rp 6,825,000	100	100	Efisien
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 1,100,000	Rp 1,100,000	100	100	Efisien
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Rp 3,300,000	Rp 3,300,000	100	100	Efisien
				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 3,300,000	Rp 3,300,000	100	100	Efisien

				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 8,867,000	Rp 8,867,500	100	100	Efisien
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 8,867,000	Rp 8,867,500	100	100	Efisien
				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Rp -	Rp -	-	-	Efisien
				Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal	Rp 4,080,000	Rp 4,080,000	100	100	Efisien
				Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Rp -	Rp -			Efisien
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 4,787,000	Rp 4,787,500	100	100	Efisien
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 18,540,300	Rp 18,540,000	100	100	Efisien
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 18,540,300	Rp 18,540,000	100	100	Efisien
				Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan	Rp 825,000	Rp 825,000	100	100	Efisien
III.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di kecamatan Situjuh Limo Nagari							

			peraturan Kepala Desa					
			Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 3,825,000	Rp 3,825,000	100	100	Efisien
			Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Rp 3,180,000	Rp 3,180,000	100	100	Efisien
			Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat daerah	Rp -	Rp -	-	-	Efisien
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp 300	Rp -	-	-	Efisien
			Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Rp -	Rp -	-	-	Efisien
			Fasitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Rp 4,710,000	Rp 4,710,000	100	100	Efisien
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	100	100	Efisien
			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	100	100	Efisien
		Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 14,475,500	Rp 14,405,000	100	100	Efisien
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 14,475,500	Rp 14,405,000	100	100	Efisien
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 5,525,500	Rp 5,455,000	100	100	Efisien

				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 8,950,000	Rp 8,950,000	100	100	Efisien
				JUMLAH	Rp 1,710,186,378	Rp 1,702,606,087	99,56	98,02	Efisien

3.5 HASIL TINDAK LANJUT LHE INSPEKTORAT

Beberapa evaluasi inspektorat terhadap Laporan kinerja kecamatan Situjuh Limo Nagari yaitu:

- Kecamatan Situjuh Limo Nagari telah memiliki dokumen Renstra tahun 2016-2021, namun Renstra belum memuat indikator kinerja tujuan dan renstra sudah di publikasikan, namun belum direviu secara berkala.
- Renstra telah memuat ukuran keberhasilan walau belum sempurna belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.
- Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon II, III dan IV sebagai kinerja atasannya.
- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala (Bulanan/triwulan/semester)
- Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi.
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari eselon IV keatas belum dikaitkan/ dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.
- Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- Laporan Kinerja telah di *upload* ke dalam *website*, namun belum di *reviu* secara berkala.
- Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilaksanakan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan belum berkesinambungan.
- Belum ada pemantauan Rencana aksi sehingga tidak bisa memberikan alternatif perbaikan setiap periode.
- Target pada umumnya telah dapat dicapai dengan baik dari tahun sebelumnya, serta informasi kinerja dapat diandalkan.

3.6 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Sepanjang tahun 2021 Kecamatan Situjuh Limo Nagari belum mendapatkan penghargaan ditingkat nasional maupun ditingkat provinsi Sumatera Barat.

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pada tahun 2021 Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Tahun 2021			Kode
				Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	%	75	66,09	89,2 %	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	83,06	103,83%	
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	%	5 Nagari	5 Nagari	100 %	

		Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu	%	100%	80%	80%	
4	Meningkatnya keberdayaan masyarakat nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	%	80%	80%	100%	

Pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dituangkan pada Rencana Strategis Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang diselaraskan dengan Program dan Indikator Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sudah dapat dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan harapan.

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN DI MASA YANG AKAN DATANG

Disadari bahwa selama Tahun 2021 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Situjuh Limo Nagari mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya.

Guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari melalui perhitungan survey kepuasan masyarakat dengan menganalisa unsur – unsur pelayanan yang kurang maksimal dengan peningkatan sarana dan prasaranan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan nagari dalam hal peningkatan pembangunan dalam mendorong desa maju dan berkembang di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan pengawasan

perencanaan sesuai dengan program dan kegiatan prioritas desa membangun.

- c. Mendorong pembinaan dan pengawasan untuk mempercepat penyampaian APB Nagari sehingga target dari kecamatan tercapai.
- d. Mendorong pembentukan dan pengembangan BUMNAG Nagari melalui pelatihan dan pembinaan.
- e. Meningkatkan nilai AKIP yang direview oleh inspektorat agar tercapainya target.

Selanjutnya dengan optimistis ke depan Kecamatan Situjuh Limo Nagari akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan pada semua tataran.

Banda Dalam, Februari 2022

